

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN WILAYAH DI PROVINSI ACEH

Abstract

The aims of this research are to understand the development disparities, income distribution, human development, and the geographical difficulties in North-East, Center-South East, and West-South of Aceh Regions. The methods of analysis used are Williamson Index, Lorentz Curve, Gini Coefficient, Human Development Index (IPM), and Geographical Difficulties Index (IKG). The results show that based on Williamson Index, the developments in the North-East, Center-South East Regions of Aceh are still low. Based on the Lorentz Curve, West-South Region is far from equality line, it is followed by Center-South East and North-East Regions. Thus, it can be stated that West-South and Center-South East Regions experience relatively greater income disparities compared to North-East Region. Based on Human Development Index Calculation, West-South of Aceh is the region that has lowest Human Development Index, then it followed by Center-South East and North-East Regions of Aceh. Based on Geographical Difficulties Index, West-South Region of Aceh has the highest Geographical Difficulties Index compared to Center-South East and North-East Regions of Aceh viewed from the existence of basic services, infrastructure condition, and transportation. The government must strive to reduce development disparities in the North-East, Central-Southeast and West-South regions of Aceh so that there will be no provincial division and conflict between regions.

Muhammad Reza

*Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
Email: rezastone19@gmail.com*

Abd. Jamal

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Syiah Kuala
Email: abdjamal@unsyiah.ac.id*

T. Zulham

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Syiah Kuala
Email: Teukuzulham@unsyiah.ac.id*

Keywords:

*Kemiskinan, Ketimpangan, distribusi
Pendapatan*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pada tingkat global, negara-negara di dunia pernah membuat deklarasi pada tahun 2000 di New York yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. Program MDGs telah berjalan selama 15 tahun dengan mencatatkan kesuksesan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. Program tersebut berakhir pada tahun 2015, kemudian dilanjutkan dengan Program yang mempunyai cakupan lebih luas yang dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Program SDGs mempunyai 17 tujuan, yang salah satunya adalah mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara (UNDP, 2017).

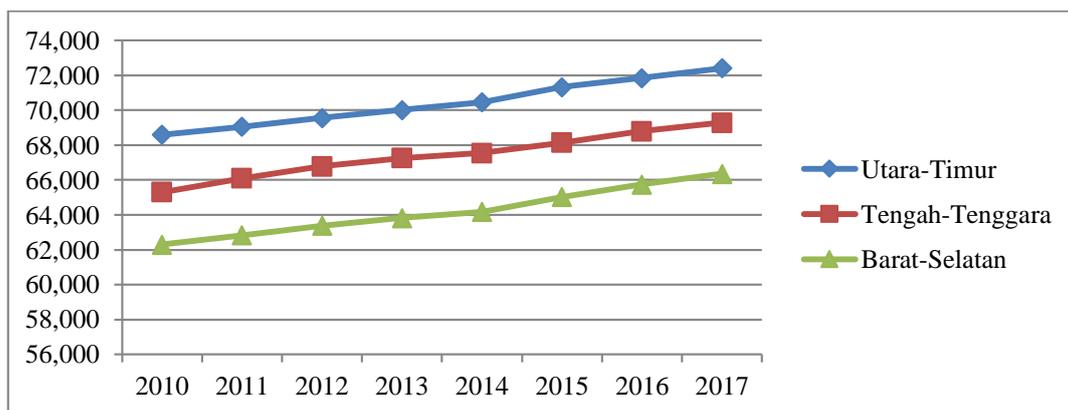
Pada tingkat nasional telah ditetapkan prioritas sasaran pembangunan nasional. Salah satu prioritas tersebut adalah melakukan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah. Untuk mengukur keberhasilan Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

IPM Indonesia pada tahun 2017 adalah 69,55 persen. Angka tersebut merupakan rata-rata nasional dari seluruh Provinsi di Indonesia. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 78,99 persen, sedangkan terendah adalah Papua yang hanya sebesar 57,25 persen. Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai IPM berada di bawah rata-rata Nasional. IPM Aceh pada tahun 2017 sebesar 70,6 persen, masih berada di bawah IPM Indonesia yang sebesar 70,81 persen (BPS, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Aceh masih relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia akibat konflik yang berkepanjangan selama lebih kurang 30 tahun.

Secara letak geografis, wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah Pantai Timur-Utara, Tengah, dan Pantai Barat-Selatan. Ketiga wilayah tersebut memiliki kondisi bentang alam dan kemajuan infrastruktur yang berbeda. Wilayah Pantai Timur-Utara (11 kabupaten/kota) terdiri dari Kota Banda Aceh, Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Wilayah Tengah (4 kabupaten) terdiri dari Kabupaten Bener Meuriah, Aceh

Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Sedangkan wilayah Pantai Barat-Selatan (8 kabupaten/kota) terdiri dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subulussalam dan Kabupaten Simeulue (Abdullah, 2012).

IPM Aceh menurut 3 wilayah dari tahun 2010 hingga 2017 menunjukkan bahwa wilayah Utara-Timur mempunyai IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan. Dari tahun 2010 sebesar 68,61 naik menjadi 72,42 pada 2017. Rata-rata IPM wilayah Tengah-Tenggara berada dibawahnya, yakni sebesar 65,30 pada 2010 dan naik menjadi 69,30 pada 2017. Sementara itu rata-rata IPM di wilayah Barat-Selatan berada paling bawah, yakni sebesar 62,30 pada 2010 dan 66,35 pada 2017.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Gambar 1. IPM di 3 Wilayah di Aceh, 2010- 2017

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Utara-Timur Aceh lebih baik dibandingkan di wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh. Atau dengan kata lain masih terjadi ketimpangan pembangunan pada ketiga wilayah di Aceh tersebut.

Dari sisi ekonomi, pembangunan suatu daerah dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi/kabupaten/kota atau pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi berarti aktivitas menghasilkan barang dan jasa semakin meningkat dan kemakmuran suatu daerah semakin baik.

Laju pertumbuhan ekonomi Aceh selama periode 2010 hingga 2017 mengalami fluktuasi dan cenderung melambat. Berdasarkan wilayah terlihat bahwa wilayah Utara-Timur Aceh memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh. Sementara itu wilayah Barat-Selatan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang paling rendah. Pada 2010 pertumbuhan ekonomi wilayah Utara-Timur sebesar 4,61 persen dan turun pada 2017 menjadi 4,21 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi wilayah Barat-Selatan sebesar 4,02

persen pada 2010 dan sedikit naik menjadi 4,09 pada 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah Utara-Timur lebih baik dibandingkan wilayah lainnya di Aceh. Atau dengan kata lain terjadi ketimpangan secara ekonomi pada ketiga wilayah Aceh tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana ketimpangan pembangunan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh? (2) Bagaimana distribusi pendapatan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh? (3) Bagaimana tingkat pembangunan manusia di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh? (4) Bagaimana tingkat kesulitan geografis di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh?

TINJAUAN TEORITIS

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Nugroho dan Dahuri (2004) mengartikan pembangunan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Menurut Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia.

Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah. (Williamson, 1965, dalam Hartono, 2008). Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan, ada ketimpangan pembangunan

ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah.

Norris et al (2015) dalam penelitiannya ‘Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective’ mengungkapkan beberapa faktor yang membawa kepada ketimpangan yang lebih besar di dunia antara lain: pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi, perdagangan global, keuangan global, financial deepening, perubahan institusi pasar tenaga kerja, kebijakan redistribusi dari pemerintah, dan pendidikan. Penelitian Ncube, Anyanwu dan Hausken (2013) dengan judul “Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA)” menampilkan pola ketimpangan, pertumbuhan, dan ketimpangan pendapatan di kawasan MENA. Penelitian ini juga menyelidiki dampak dari ketimpangan pendapatan pada pembangunan sosial kunci yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di kawasan ini. Hasil empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di kawasan.

Berdasarkan studi kepustakaan, hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini yaitu: diduga terjadi ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan antara wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini yaitu meneliti ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di wilayah Provinsi Aceh. Ketimpangan pembangunan wilayah di Aceh dikelompokkan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu: Utara-Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponennya yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita, dan Indeks Kesulitan Geografis di 3 (tiga) wilayah yaitu: Utara-Timur, Tengah-Tenggara, dan Barat-Selatan Aceh.

Metode analisis yang digunakan antara lain: Indeks Williamson, Gini Rasio dan Kurva Lorentz, IPM dan IKG. Indeks Williamson untuk melihat ketimpangan ekonomi antar wilayah. Gini Rasio dan Kurva Lorentz digunakan untuk melihat Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar wilayah di Provinsi Aceh. IPM untuk melihat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Dan IKG untuk melihat tingkat kesulitan geografis antar wilayah.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

f_i = Jumlah penduduk wilayah ke-i (jiwa)

n = Jumlah penduduk Provinsi Aceh (jiwa)

Y_i = PDRB per kapita wilayah ke-i (Rupiah)

Y = PDRB per kapita rata-rata

Rumus dari Gini Rasio adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Keterangan:

GR : Koefisien Gini

f_{pi} : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci1} : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-ia Provinsi Aceh (Rupiah)

Kurva Lorenz adalah kurva yang bisa dijadikan patokan dalam menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan. Unsur dalam kurva lorenz : Sumbu horizontal (sumbu x /mendatar) mendefenisikan persentase kumulatif penduduk. Sementara sumbu vertikal (sumbu y/ tegak) mewakili persentase pendapatan IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (2) Pengetahuan (knowledge), (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Variabel dalam IPM Metode Baru antara lain Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (*Life Expectancy - e0*), Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*). Angka Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang diterima penduduk.

IKG disusun dari tiga komponen. Pertama, ketersediaan pelayanan dasar seperti fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan. Kedua, kondisi infrastruktur seperti keberadaan fasilitas ekonomi. Ketiga, akses transportasi seperti jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum; serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati/walikota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Salah satu alat untuk mengukur ketimpangan ekonomi di suatu wilayah adalah Indeks Williamson. Indeks ini menggunakan indikator PDRB dan jumlah penduduk pada suatu wilayah sebagai data dasar dalam perhitungannya. PDRB digunakan untuk mewakili indikator ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk digunakan sebagai pembagi untuk mendapatkan PDRB per kapita. Ketimpangan termasuk kategori ringan apabila kurang dari 0,35, ketimpangan sedang antara 0,35 sampai dengan 0,5 dan ketimpangan tinggi apabila lebih dari 0,5.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Indeks Williamson

NO	WILAYAH	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB/ kapita	Perhitungan			
				(Yi)	(Yi-Y)	(Yi-Y) ²	fi/n	(Yi-Y) ² x fi/n
1	Utara-Timur	3.301.492	88.992.677	26,955	1,017	1,035	0,660	0,683
2	Tengah-Tenggara	620.806	15.118.423	24,353	-1,585	2,513	0,124	0,312
3	Barat-Selatan	1.079.655	25.629.788	23,739	-2,199	4,836	0,216	1,044
	Σ	5.001.953	129.740.888	25,938				2,039
		N		Y				1,428
	Indeks Williamson							0,055

Sumber: Data Hasil Pengolahan dengan *MS. Excel*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1, diketahui bahwa Indeks Williamson sebesar 0,055 atau masih dibawah 0,35. Dengan nilai yang sangat kecil tersebut artinya ketimpangan diantara wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh termasuk kategori ringan.

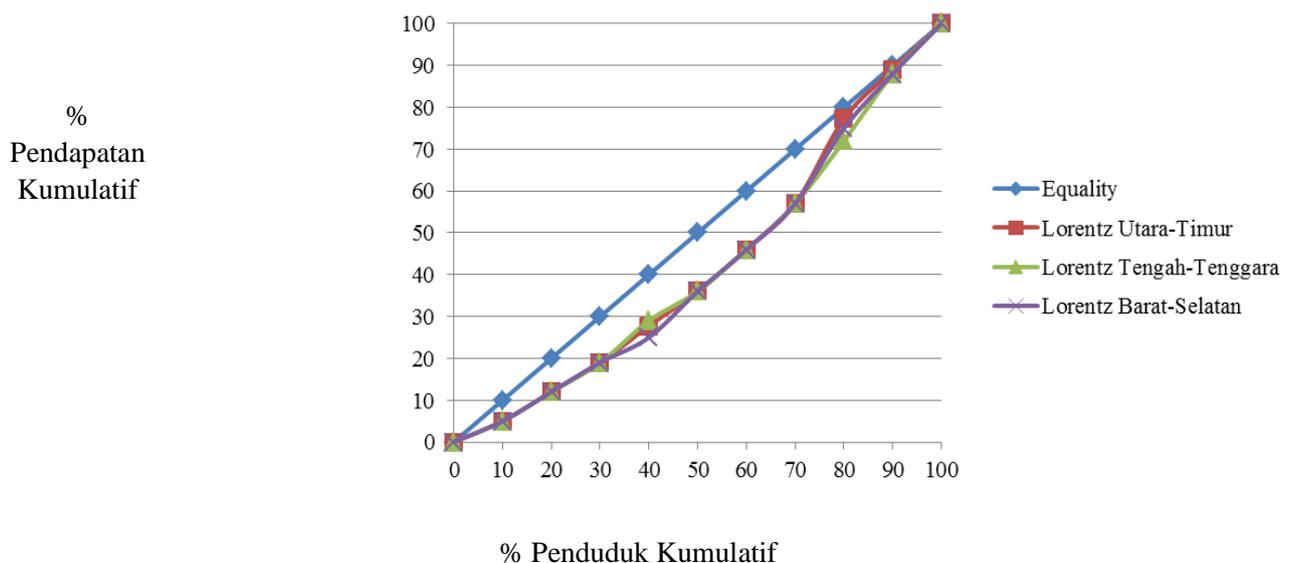
Distribusi Pendapatan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Beberapa ukuran distribusi pendapatan yang umum antara lain Kurva Lorenz dan Gini Rasio. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan

distribusi pendapatan. Sedangkan Gini Rasio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan apabila bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna.

Kurva Lorentz wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan adalah Kurva Lorent. Kurva Lorentz membandingkan persentase penduduk kumulatif dan persentase pendapatan kumulatif dengan garis pemerataan (*equality*). Semakin jauh Kurva Lorent dari garis equality berarti ketimpangan semakin besar.



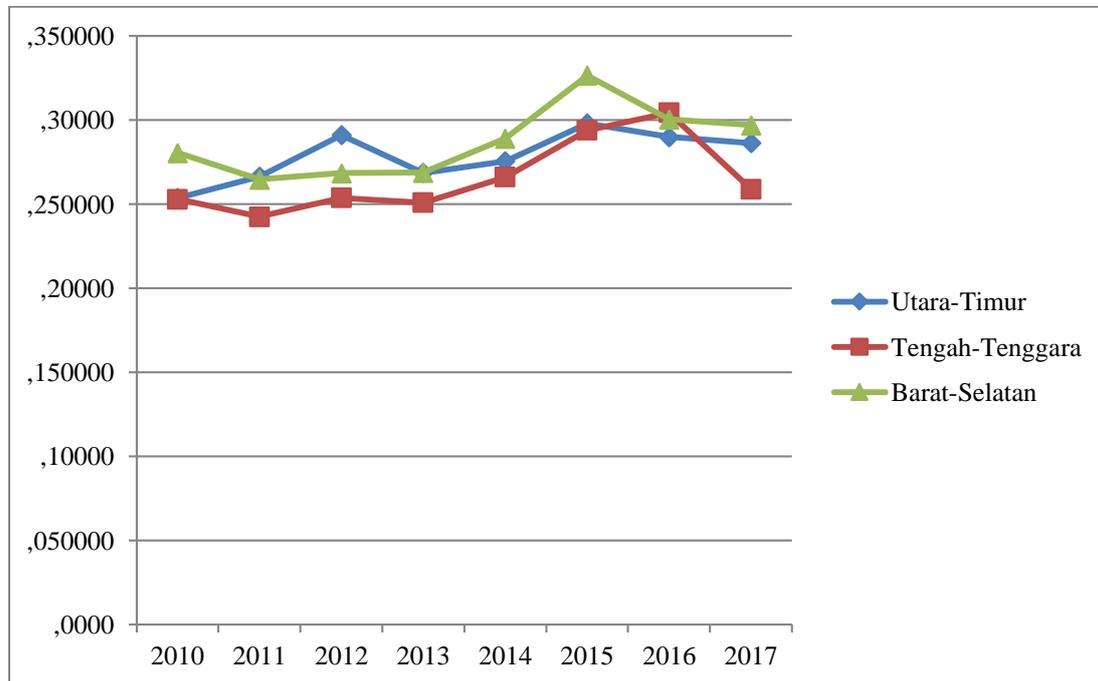
Sumber: Hasil Pengolahan Data

Gambar 2 Kurva Lorentz di 3 Wilayah di Aceh, 2017

Berdasarkan gambar 2, terlihat bahwa kurva Lorentz untuk ketiga wilayah hampir berhimpitan. Tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan dari ketiga wilayah tersebut. Pada titik kumulatif penduduk 40 persen, terlihat bahwa Kurva Lorent wilayah Barat-Selatan lebih jauh terhadap garis equality dibandingkan 2 wilayah lainnya, sedangkan pada titik kumulatif penduduk 80 persen, terlihat bahwa Kurva Lorent wilayah Tengah-Tenggara lebih jauh terhadap garis equality dibandingkan 2 wilayah lainnya. Sehingga dari Kurva Lorentz terlihat bahwa wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara relatif mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah Utara-Timur.

Gini Rasio wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Pembangunan ekonomi, dinilai tidak hanya dinilai dari sisi pertumbuhannya saja tetapi juga dari sisi pemerataan. Ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah (Hartono, 2008). Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk adalah Gini Rasio. Gini Rasio di atas 0,3 berarti terjadi ketimpangan kategori sedang (BPS, 2012).



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 3 Gini Rasio di 3 Wilayah di Aceh, 2010-2017

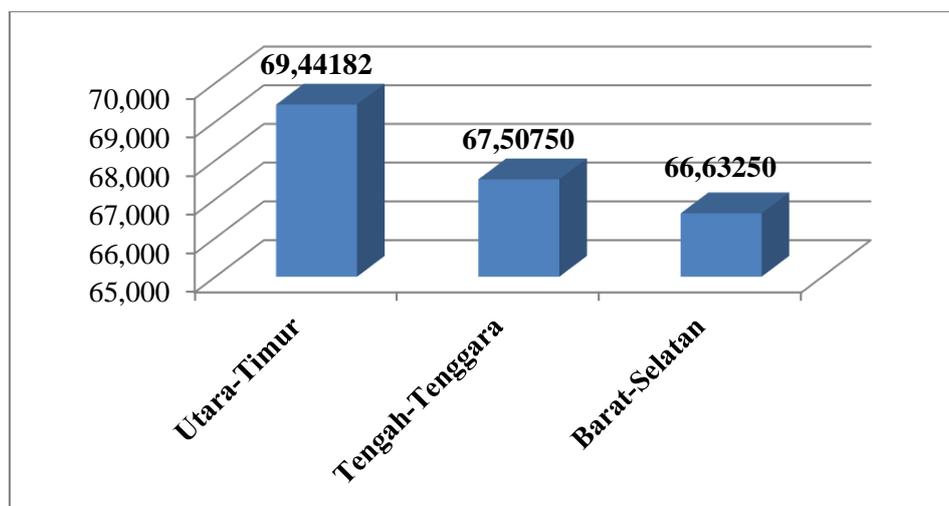
Berdasarkan Gambar 3, Gini Rasio Aceh selama periode 2010 hingga 2017 menunjukkan trend yang relatif meningkat. Wilayah Barat-Selatan Aceh secara rata-rata memiliki ketimpangan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya, yaitu sebesar 0,281 pada 2010 dan meningkat menjadi 0,297 pada 2017. Wilayah Utara-Timur pada 2010 sebesar 0,254 dan meningkat menjadi 0,286 pada 2017. Sementara itu wilayah Tengah-Tenggara mempunyai ketimpangan yang paling rendah yaitu sebesar 0,253 pada 2010 dan meningkat menjadi 0,259 pada 2017. Perbedaan ketimpangan antara wilayah akan menimbulkan masalah sehingga harus diupayakan agar lebih merata. Walaupun demikian, ketimpangan pada ketiga wilayah tersebut masih tergolong rendah karena masih dibawah 0,3, kecuali di wilayah Barat-Selatan yang sempat menyentuh 0,327 pada 2015.

Indeks Pembangunan Manusia wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi. Dimensi kesehatan diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dimensi pendidikan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi ekonomi diwakili oleh indikator Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan dalam IPM diukur melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



Sumber: Hasil Pengolahan

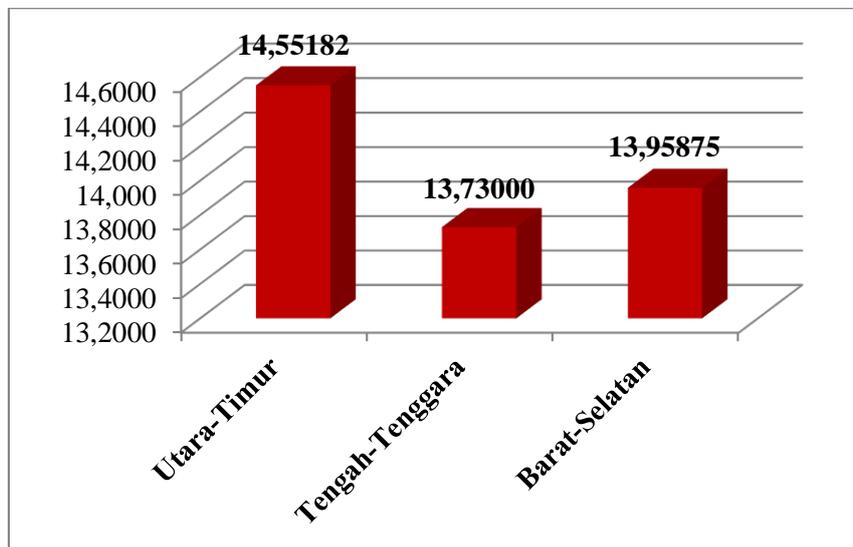
Gambar 4. Angka Harapan Hidup (tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017

Berdasarkan gambar 4., angka harapan hidup yang paling tinggi adalah di wilayah Utara-Timur Aceh dengan 69,44 tahun. Sedangkan yang kedua di wilayah Tengah-Tenggara dengan 67,51 tahun. Dan angka harapan hidup yang paling rendah yaitu di wilayah Barat-Selatan Aceh selama 66,63 tahun. Hal ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang paling tinggi berada di wilayah Utara-Timur, disusul oleh wilayah Tengah-Tenggara. Sementara itu yang paling rendah berada di wilayah Barat-Selatan Aceh.

Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan dalam IPM diukur melalui indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

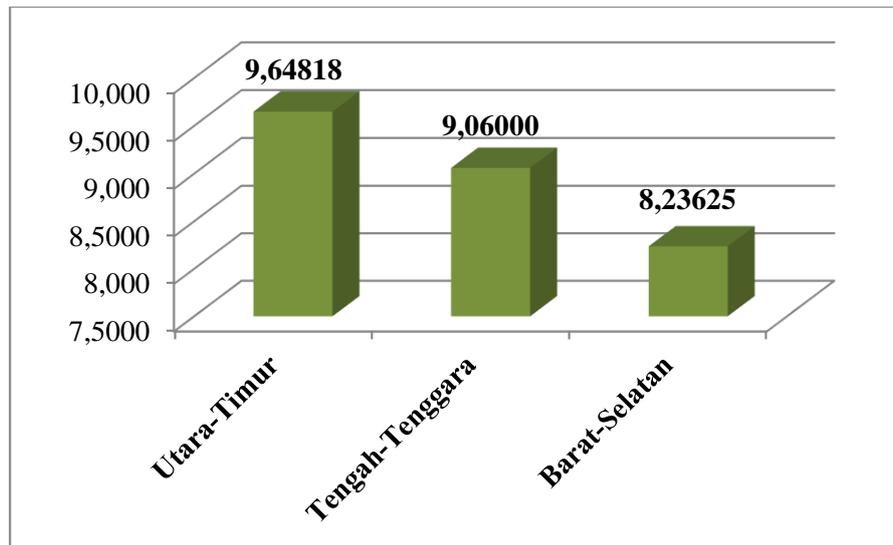


Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 5. Harapan Lama Sekolah (Tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017

Berdasarkan gambar 5, Harapan Lama Sekolah yang tertinggi berada di wilayah Utara-Timur dengan 14,55 tahun. Disusul oleh wilayah Barat-Selatan Aceh dengan 13,96 tahun. Kemudian wilayah Tengah-Tenggara Aceh dengan 13,73 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan yang terbaik berada di wilayah Utara-Timur, sedangkan yang paling buruk berada di wilayah Tengah-Tenggara.

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.



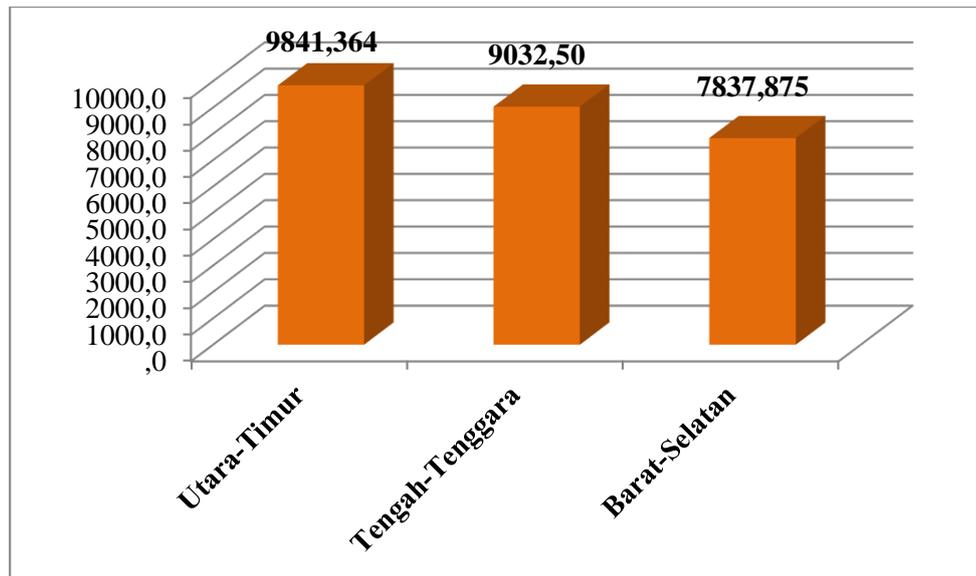
Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di 3 Wilayah di Aceh, 2017

Dari gambar 6, wilayah Utara-Timur memiliki Rata-Rata Lama Sekolah yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Aceh, yaitu selama 9,65 tahun. Kemudian disusul oleh wilayah Tengah Tenggara selama 9,06 tahun. Dan yang paling rendah adalah wilayah Barat-Selatan selama 8,24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan pendidikan yang paling tinggi berada di wilayah Utara-Timur, sedangkan yang paling rendah berada di wilayah Barat-Selatan.

Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam IPM diukur melalui indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity- PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan (BPS, 2017).



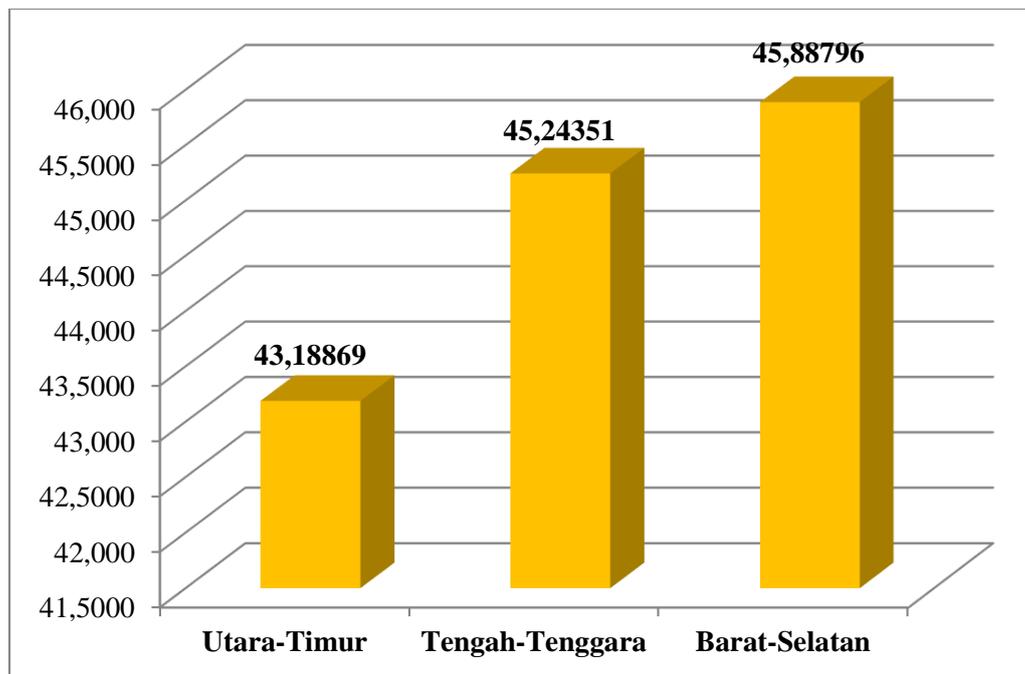
Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 7. Pengeluaran Per Kapita (000) di 3 Wilayah di Aceh, 2017

Gambar 7 menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita tertinggi berada di wilayah Utara-Timur sebesar 9,8 juta per tahun, disusul oleh wilayah Tengah-Tenggara sebesar 9,03 juta per tahun. Kemudian wilayah Barat-Selatan sebesar 7,8 juta per tahun. Data diatas menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi wilayah Utara-Timur memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh.

Indeks Kesulitan Geografis wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat Selatan Aceh

Untuk melihat tingkat kesulitan geografis dan infrastruktur suatu daerah dapat dilihat melalui indikator Indeks Kesulitan Geografis (IKG).Angka ini mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi.Indeks ini memiliki skala0–100, semakin tinggi nilai IKG, keterjangkauan warga desa terhadap ketiga faktor tersebut semakin sulit (BPS, 2017).



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 8. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) di 3 Wilayah di Aceh, 2014

Berdasarkan gambar 8, terlihat bahwa wilayah Barat-Selatan Aceh memiliki rata-rata IKG yang paling tinggi dibandingkan wilayah Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. IKG wilayah Barat-Selatan sebesar 45,89 berbanding 45,24 di Tengah-Tenggara dan 43,19 di Utara-Timur. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum wilayah Barat-Selatan memiliki tingkat kesulitan geografis yang paling tinggi dilihat dari keberadaan fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi. Wilayah Tengah-Tenggara merupakan yang tersulit kedua dengan nilai IKG yang hampir sama dengan wilayah Barat-Selatan Aceh. Sementara itu wilayah Utara-Timur merupakan yang termudah dari sisi geografis dan infrastruktur dengan nilai IKG yang paling rendah. Hal ini mencerminkan bahwa wilayah Utara-Timur secara umum mempunyai fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi yang lebih baik dibandingkan wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan Penghitungan Indeks Williamson ketimpangan pembangunan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh masih tergolong rendah. (2) Berdasarkan Kurva Lorenz, wilayah Barat-Selatan paling jauh terhadap garis *equality*, disusul oleh

wilayah Tengah-Tenggara dan Utara-Timur. Berdasarkan Gini Rasio wilayah Barat-Selatan merupakan yang paling tinggi, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur. Sehingga dapat dikatakan wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara relatif mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah Utara-Timur. (3) Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dilihat menurut aspek kesehatan, wilayah Barat-Selatan Aceh merupakan yang paling buruk tingkat kesehatannya, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. Dari aspek pendidikan, wilayah Barat-Selatan Aceh yang paling buruk, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. Dan dari aspek ekonomi, wilayah Barat-Selatan Aceh juga yang paling buruk, disusul oleh Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh. (4) Berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG), wilayah Barat-Selatan memiliki tingkat kesulitan geografis yang paling tinggi dilihat dari keberadaan fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi. Disusul oleh wilayah Tengah-Tenggara dan Utara-Timur Aceh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah Utara-Timur, Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh agar tidak terjadi pemekaran provinsi dan konflik antar wilayah.
2. Pemerintah harus berupaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan terutama di wilayah Tengah-Tenggara dan Barat-Selatan Aceh yang memiliki ketimpangan paling besar.
3. Pemerintah harus meningkatkan percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi terutama di wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara yang cukup tertinggal dari wilayah Utara-Timur Aceh.
4. Pemerintah harus meningkatkan percepatan pembangunan dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi terutama di wilayah Barat-Selatan dan Tengah-Tenggara yang cukup tertinggal dari wilayah Utara-Timur Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Razali. (2012). Kesenjangan Pendapatan Regional Per Kapita Antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Disertasi. PPS Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Retrieved Februari Monday, 2017, from <http://aceh.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1>
- Kartasmita, Ginanjar. (1994). Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Hartono, Budiantoro (2008). Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, Tesis S.2 Program Pasca Sarjana. Undip. Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Ncube, M., J. Anyanwu, & K. Hausken (2013). Inequality, Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). Working Paper Series, No.195.
- Norris, E. D., K. Kochhar, N. Suphaphiphat, F. Richka, & E. Tsounta (2015). Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective. International Monetary Fund.
- Nugroho, I dan R. Dahuri.(2004). Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Siagian, S.P. (1994). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung.
- Tikson, Deddy. (2005). Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- UNDP.(2017). Millennium Development Goals. Retrieved February Monday, 2017, from http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html